

DPRD Banten Minta Pemprov Segera Cairkan Tukin ASN

SERANG (IM)- Anggota Komisi III DPRD Banten, Muhsinin, menyoroti Tunjangan Kinerja (Tukin) para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, yang hingga pertengahan Februari ini belum cair.

Muhsinin meminta Sekretaris Daerah (Sekda) dan Penjabat (Pj) Gubernur Banten untuk segera merealisasikan Tukin para ASN dan juga honorer di lingkungan Pemprov Banten.

"Sekda sebagai pemangku manajemen APBD harus segera merealisasikan Tukin para ASN dan non ASN, ini jadi bagian tugas Sekretaris Daerah dan Gubernur Banten untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal ini," kata Muhsinin, kemarin.

Muhsinin mengatakan, sudah menjadi tugas dirinya sebagai Wakil Rakyat di Komisi III DPRD Banten untuk turut memperjuangkan dan memastikan pemberian hak masyarakat, termasuk Tukin para ASN dan non ASN.

"Tugas kita sebagai Wakil Rakyat adalah untuk menjalankan sila keempat, agar bisa menghasilkan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ASN dan non ASN juga merupakan bagian masyarakat ini, sehingga kesejahteraan mereka juga harus dijamin. Jangan ada dusta atau tebang pilih, karena ASN dan honorer juga sama, harus manfaatkan haknya," ungkapnya.

Politisi Partai Golkar ini mengaku tidak mau jika keterlambatan Tukin ini dapat membawa dampak negatif bagi kinerja para ASN di Pemprov Banten. Apalagi, jika terdapat ASN yang harus terlilit utang karena keterlambatan pembayaran Tukin.

"Gaji dan Tukin ini jangan ditunda-tunda, kasian anak dan istri mereka, karena tidak semua ASN dan non ASN itu sama. Kami tidak ingin karena keterlambatan ini memunculkan pemikiran yang tidak-tidak bahkan

penyalahgunaan hukum," pungkasnya.

Alasan Belum Cair

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengungkapkan alasan tunjangan penambah penghasilan itu belum dicairkan.

Ia menjelaskan, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain menyebutkan bahwa Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN dengan memperhatikan penilaian SAKIP dari Bappeda serta melampirkan surat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Penilaian kinerja pegawai ASN di lingkungan Pemprov Banten dilakukan dengan berpedoman pada Pergub Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pergub ini bertujuan untuk melaksanakan manajemen pegawai ASN dalam rangka penilaian kinerja yang terukur, akuntabel, memberi kepastian hak, meningkatkan kualitas, dan kapasitas pegawai melalui pengelolaan kinerja.

"Berdasarkan Pergub 24 Tahun 2023, penilaian kinerja ASN dilakukan melalui Sistem Informasi Kinerja Pegawai ASN," terang Rina melalui pesan singkat via aplikasi WhatsApp, Jumat (16/2).

Sistem Informasi Kinerja Pegawai ASN merupakan salah satu alat bantu yang digunakan untuk pengukuran TPP bagi pegawai sesuai bobot penilaian pencapaian hasil kerja dan perilaku kerja dengan memperhatikan nilai dasar ASN.

Rina mengungkapkan, saat ini sedang disusun Surat Edaran terkait petunjuk teknis pengukuran kinerja Pegawai ASN. "Sehingga perangkat daerah dapat segera melakukan pengukuran kinerja dan mengajukan Tambahan Penghasilan ASN," terangnya. ● **pra**



IDN/ANTARA

PROGRES PEMBANGUNAN JEMBATAN LAYANG CIROYOM

Seorang anak membawa sepeda di Jembatan Layang Ciroyom, Bandung, Jabar, Jumat (16/2). Jembatan Layang Ciroyom yang ditujukan untuk mendukung operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung tersebut telah menjalani uji beban pada awal Februari 2024 dan telah masuk ke tahap penyelesaian akhir.

Warga Tangsel Diwajibkan Urus Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak atau KIA akan menjadi syarat wajib bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan anak mereka masuk ke SD, SMP dan SMA di Kota Tangsel, selain melampirkan Akta dan Kartu Keluarga.

TANGSEL (IM)- Warga Kota Tangsel yang telah memiliki anak diwajibkan untuk mengurus pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangsel, Dedi Budiawan mengatakan, seluruh ma-

sarakat Tangsel diwajibkan mengurus pembuatan KIA bagi anak mereka sejak usia 1 tahun hingga 17 tahun.

Menurut Dedi, KIA akan menjadi syarat wajib bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan anak mereka masuk ke SD, SMP dan SMA di Kota Tangsel, selain melampirkan Akta dan

Kartu Keluarga.

"Saat ini pembuatan KIA oleh masyarakat wajib, dan kami saat ini bisa dikatakan memaksa atau mewajibkan masyarakat untuk segera mengurus KIA bagi anak mereka," ujar Dedi, Jumat (16/2).

Dedi menegaskan, pembuatan KIA mulai dari saat ini harus segera dilakukan masyarakat, sehingga progres dan target pendistribusian KIA di Kota Tangsel dapat tercapai.

"KIA itu di kita baru 50 persen dari target 360 ribu target, berarti baru 180 ribuan. Sementara target nasional itu 60 persen. Berarti

masih kurang 36 ribuan. Kekurangan itu yang harus dipercepat," ujar Dedi.

Dedi mengatakan, bagi masyarakat yang ingin mengurus KIA bisa datang ke Kantor sementara Disdukcapil, di samping kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangsel.

Selain itu, terdapat pula 8 gerai sentra layanan administrasi agar memudahkan masyarakat dalam menjangkau layanan administrasi.

Kedelapan layanan tersebut berada di Mall Living World, Mall Alam Sutera, Mall Teras Kota, Plaza Bintaro, Pondok

Aren, Pamulang Square, Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Pamulang Viktor.

Dedi menegaskan, mengurus pembuatan KIA dapat dilakukan hitungan menit dan Kartu Identitas Anak bisa langsung jadi. "Langsung jadi hitungan menit," tegasnya.

Dedi mengatakan, agar lebih memudahkan masyarakat menjangkau layanan adminduk, pihaknya tahun ini juga berencana membuka layanan di 7 Kantor Kelurahan strategis. "Dan bisa juga pakai layanan ojek online drive thru," tandasnya. ● **pp**

Pemkot Buka Sayembara Desain Kawasan Kota Cilegon

CILEGON (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) membuka Sayembara Desain Kawasan Kota Cilegon dengan total hadiah ratusan juta.

Sayembara Desain Kawasan Kota Cilegon tersebut secara resmi diluncurkan langsung Wali Kota Cilegon, Hellydy Agustian di Aula Setda II Kota Cilegon, Jumat (16/2).

Dikatakan Hellydy, Desain Kawasan Kota Cilegon ini dilakukan lantaran Kota Cilegon merupakan gerbang Pulau Jawa, ketika orang dari Pulau Sumatra yang hendak ke Pulau Jawa itu pertama kali melintasi di Kota Cilegon.

Untuk itu, perlunya penataan Kota Cilegon yang modern, namun tidak menghilangkan karakteristik dari Kota Cilegon tersebut. "Makanya, tahun ini dilakukan Sayembara Desain Kawasan Kota Cilegon, karena Cilegon ini kan banyak industrinya dan kotanya hanya sekadar lintas saja. Makanya kita pengen ke depan orang bukan hanya melintas saja tapi bisa menikmati keindahan di Cilegon," terang Hellydy.

Disampaikan Hellydy, pada kegiatan tersebut, pihaknya menggandeng Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Banten. Jadi dari tim juri dan pelaksanaan yang dijalankan dari pihak IAI Provinsi Banten.

Diterangkan Hellydy, dari sayembara tersebut dilakukan gabungan

secara menyeluruh, namun untuk pemenang pihaknya bakal mengambil dua wilayah. Yakni, wilayah Cilegon Timur hingga Damkar dan dari Cilegon Barat hingga Asdp Merak.

"Jadi dibagi menjadi dua wilayah, masing-masing wilayah itu bakal ada pemenangnya mulai juara satu, dua, dan tiga," terangnya.

Adapun untuk hadiah, pihaknya menganggarkan dari APBD sebesar Rp280 juta, namun rencananya bakal ditambah melalui sponsor dengan rincian juara satu Rp150 juta, juara dua Rp100 juta, dan juara tiga Rp75 juta.

"Sebenarnya total hadiah yang kita anggarkan Rp280 juta, tapi nilai tersebut dirasa masih kurang, makanya kami bakal tambah melalui dukungan sponsor dengan nilai juara satu Rp150 juta, juara dua Rp100 juta, dan juara tiga Rp75 juta masing-masing wilayah," terang Hellydy.

Dirinya berharap, sayembara ini diikuti oleh seluruh masyarakat Kota Cilegon khususnya kepada para Arsitek yang memiliki sertifikat, bisa juga diikuti individu maupun kelompok.

"Sudah kami launching hari ini dan bakal kita umumkan pemenangnya saat peringatan Hari Jadi ke-25 Kota Cilegon 27 April 2024. Jadi kami harapkan masyarakat banyak yang ikut serta dalam sayembara ini baik di Cilegon maupun luar Cilegon karena kita buka secara nasional yang terpenting memiliki sertifikat arsitek," tukasnya. ● **pra**

Tetua Baduy Ajak Masyarakat Jaga Kedamaian dan Persatuan Usai Pemilu

LEBAK (IM)- Tetua adat Baduy yang juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, Jaro Saija mengajak seluruh masyarakat agar menjaga kedamaian dan persatuan usai pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024.

"Kita jangan sampai usai pemilu terjadi konflik antarsesama anak bangsa, sehingga bisa menimbulkan perpecahan," kata Jaro Saija di Lebak, Jumat (16/2).

Masyarakat Baduy usai melaksanakan pemilu di 27 tempat pemungutan suara (TPS) dengan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 6.078 jiwa tetap rukun, damai, aman dan kondusif.

Kawasan Baduy yang memiliki penduduk 12.600 jiwa di 68 perkampungan kehidupan mereka seperti biasa melakukan pekerjaan rutinitas ke kebun ladang untuk bercocok tanam palawija dan hortikultura.

Karena itu, pihaknya minta kedamaian dan persatuan tetap dijaga dan dilestarikan usai melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan.

"Kita siapapun pemimpinnya hasil pemilu itu tentu seluruh masyarakat menerima dan mendukungnya serta jangan sampai terjadi perpecahan," kata Jaro Saija menambahkan.

Jaro Saija berharap masyarakat bisa bersatu dan menciptakan kedamaian, keharmonisan, kerukunan, karena Indonesia merupakan negara besar.

Sebab, masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman perbedaan suku, kepercayaan, sosial, budaya dan bahasa lebih indah usai pemilu tetap utamakan persatuan dan kesatuan.

Apabila, kehidupan itu bersatu dipastikan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Tanah Air. "Kami sebagai warga negara tentu dalam kehidupan di masyarakat Baduy menjunjung tinggi kedamaian dan persatuan," katanya menjelaskan.

Ia mengatakan, selama ini, masyarakat Baduy Dalam sejak dulu hingga kini tidak menggunakan hak pilih dalam

pemilihan umum, karena bertentangan dengan adat setempat.

Masyarakat Baduy Dalam yang tersebar di Kampung Ciboe, Cikawartana dan Cikusik tentu berbeda dengan kehidupan Baduy Luar atau Badui penamping.

Untuk masyarakat Baduy Dalam hingga kini masih kuat memegang adat leluhur nenek moyang dengan tidak berpoltik baik pada pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun pemilihan kepala daerah.

Selain itu juga masyarakat Baduy kemanapun pergi harus berjalan kaki dan dilarang naik kendaraan.

Dengan demikian, masyarakat Baduy Dalam pemilu itu hanya bersikap "lungang" atau milu kanu menang" (ikut kepada yang menang saja).

"Kita tentu menghormati dan menghargai keputusan adat masyarakat Baduy Dalam itu," pungkas Jaro Saija. ● **pra**



IDN/ANTARA

PENGOLAHAN ROTAN MANAU DI MENTAWAI

Pekerja menyusun rotan manau yang sudah dibersihkan di Desa Muntei, Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai, Sumbar, Jumat (16/2). Rotan premium asal hutan Mentawai yang memiliki nilai ekonomi tinggi itu dijual pengepul Rp16 ribu per batang dengan panjang tiga meter.



IDN/ANTARA

PAMERAN PRODUK UMKM BALI

Pengunjung memilih produk kerajinan yang dijual saat pameran industri dan perdagangan di Denpasar, Bali, Jumat (16/2). Pameran diselenggarakan untuk membantu promosi dan pemasaran produk UMKM unggulan Bali serta untuk mendorong pelaku UMKM meningkatkan kualitas produknya.

KPU Bayar Gaji 36.225 Anggota KPPS Kota Tangerang

TANGERANG (IM)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang mulai membayarkan gaji anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 dengan jumlah total 36.225 orang.

Ketua KPU Kota Tangerang, Qori Ayatullah di Tangerang Jumat (16/2), mengatakan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 472 Tahun 2022 tentang satuan biaya masukan lainnya (SBML) telah disiapkan gaji sebesar Rp1.200.000 untuk Ketua KPPS dan Rp 1.100.000 untuk anggota KPPS.

"Seperti yang tertuang dalam amanat regulasi, kami menargetkan penyaluran gaji anggota KPPS dapat dituntaskan sebelum masa kerja berakhir, yakni pada 25 Februari 2024," ujarnya.

Ia mengatakan pembayaran gaji KPPS melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bertugas di setiap kelurahan. "Kami telah mulai menyalurkan gaji KPPS se-

cara bertahap sejak kemarin sampai waktu yang telah ditargetkan," ujarnya.

Qori menambahkan KPU Kota Tangerang juga mengapresiasi kinerja anggota KPPS yang telah menuntaskan pelaksanaan pemungutan suara di 5.175 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah Kota Tangerang. "Kami mengapresiasi sebesar-besarnya atas kinerja terbaik anggota KPPS di seluruh Kota Tangerang," katanya.

Pada Pemilu 2024 di Kota Tangerang tercatat ada 1.362.773 orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 678.001 dan pemilih perempuan sebanyak 684.772.

Kemudian sebanyak 16.223 petugas pengamanan TPS dikerahkan yang terdiri dari 1.212 polisi, 13.880 petugas ketertiban (Gastib) Linmas, 978 TNI dan selebihnya dari instansi pemerintah kota/kabupaten Tangerang dalam membantu selama pelaksanaan pemilu berlangsung. ● **pp**